

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan di bumi ini, air merupakan sumber daya alam yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia dan semua makhluk hidup di bumi ini sangat tergantung pada air, manfaat air bisa dilihat dari penggunaannya seperti dibidang rumah tangga, industri, pertanian, rekreasi, dan aktivitas lingkungan lain. oleh karenanya ketersediaan air bersih harus mencukupi kebutuhan manusia seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Ditambah lagi penggunaan air pada kondisi pandemi covid-19 seperti saat ini tahun 2020-2021 dimana adanya penggunaan disinfektan untuk seluruh masyarakat dan diserukannya untuk menjaga kebersihan seperti cuci tangan dan mandi setelah bepergian, hal tersebut membuat penggunaan air meningkat. (Akbar, 2021).

Penyediaan dan pengendalian air bersih sangat penting guna menunjang kebutuhan masyarakat terlebih lagi pada saat pandemi covid-19 ini. Dalam penyediaan air bersih, sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai tanggung jawab dalam urusan pelayanan air minum kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah

daerah menunjuk suatu badan usaha yang menangani masalah penyediaan air bersih, yakni dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Sebagai salah satu fasilitas pelayanan air minum, PDAM memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya menyediakan dan mengendalikan air yang digunakan masyarakat. (Azwandi, 2014)

Dengan adanya PDAM yang mengelola air bersih dan meningkatnya permintaan air bersih. Penting bagi pemerintah Indonesia untuk memeriksa kinerja setiap perusahaan air minum setiap daerah dengan melakukan pemeriksaan atau pengauditan pada PDAM. Oleh karena itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku Auditor eksternal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Auditor internal akan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan air bersih yang dilakukan Perusahaan Daerah Air Minum.

Setiap audit yang dilakukan Auditor baik itu internal ataupun eksternal pasti tidak akan terhindar dari risiko audit. Hal ini berlaku juga terhadap pengawasan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum yang dilakukan oleh BPKP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 pasal 50 ayat (2), Audit Kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomis, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.

Dalam melaksanakan audit kinerja, Auditor harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dan risiko audit. Penugasan audit kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan khususnya berkenaan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikerjakan secara bertahap,. Semakin luas aspek kinerja yang diperiksa, maka risiko audit juga akan meningkat.

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis akan meninjau tentang risiko audit yang dihadapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam salah satu program kinerja tahunan pada tahun 2021, yakni audit kinerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jepara.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penyusunan proposal Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Apa saja risiko audit yang dimiliki Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam audit kinerja PDAM Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana cara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memitigasi risiko audit pada audit kinerja PDAM Kabupaten Jepara?
3. Apakah terdapat pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap penetapan risiko audit oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui risiko audit yang dimiliki Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam audit kinerja BPKP
2. Mengetahui cara Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah memitigasi risiko audit pada audit kinerja PDAM kabupaten Jepara.
3. Mengetahui pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap penetapan risiko audit oleh Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis termasuk dalam ilmu audit, lebih khususnya audit kinerja sektor publik atau sektor pemerintah. Ruang lingkup untuk membatasi penulisan Karya Tulis Tugas Akhir yang penulis tentukan yakni Risiko Audit yang berhubungan dengan audit kinerja PDAM Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah dan tahun pelaksanaan audit 2020.

1.5 Manfaat Penulisan

Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat.

1. Manfaat Teoritis

Dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, Penulis mengharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penetapan risiko audit yang dilakukan oleh Auditor internal pemerintah yaitu BPKP

2. Manfaat praktis

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memanfaatkan pengetahuan yang penulis miliki dalam mata kuliah audit, khususnya tentang risiko audit dan dengan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memahami pengetahuan tentang Audit.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang yang membuat penulis tertarik untuk mengambil topik penulisan, merumuskan masalah terkait topik yang diambil, membuat tujuan penulisan, menjelaskan ruang lingkup penulisan serta manfaat penulisan, menjelaskan metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan KTTA ini, dan membuat sistematika penulisan KTTA yang menggambarkan kerangka dari KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab landasan teori, penulis akan menjelaskan teori atau ketentuan yang relevan dengan masalah yang akan dibahas yakni mengenai risiko audit. Penulis berencana untuk menjelaskan pengertian, tujuan dan hal yang berhubungan dengan risiko audit. Bab landasan teori menjadi landasan untuk melakukan tinjauan atas penetapan risiko audit yang dilakukan di objek penulisan yaitu Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari beberapa subbab, yakni metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan serta pembahasan hasil. Metode pengumpulan data pada subbab KTTA akan berdasarkan pada subbab metode pengumpulan data yang ada di proposal, yakni studi literatur dan studi lapangan. Gambaran umum objek penulisan merupakan uraian informasi tentang objek penulisan yang terkait dengan KTTA, yakni BPKP Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, pembahasan hasil merupakan subbab yang berisi tentang hasil pengumpulan dan pengolahan data yang penulis peroleh melalui objek penulisan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis mengungkapkan simpulan yang didapatkan dari tinjauan risiko audit dalam evaluasi kinerja PDAM oleh BPKP Provinsi Jawa Tengah di masa pandemi yang ditarik dari uraian-uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya.